

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER

**PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI UMKM:
KOMPARASI MODEL INDONESIA DAN MALAYSIA**

YOGYAKARTA, 05 DESEMBER 2012



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA**

UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA
REVIEWER CALL FOR PAPER
PADA SEMINAR NASIONAL PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI UMKM :
KOMPARASI MODEL INDONESIA DAN MALAYSIA

1. Prof DR. Andreas Lako, M.Si
Universitas Soegijapranata Semarang (Akuntansi)
2. DR. Ayi Ahadiat, MBA
Unila, Lampung (Manajemen)
3. DR. Rudi Badrudin, MSi
STIE YKPN, Yogyakarta (Ilmu Ekonomi)
4. DR. I Ketut Nama, MSi
UPN "Veteran" Yogyakarta (Ilmu Ekonomi)
5. DR. Sabihaini, MSi
UPN "Veteran" Yogyakarta (Manajemen)
6. DR. Sri Suharsih, MSi
UPN "Veteran" Yogyakarta (Ilmu Ekonomi)
7. Drs. Y. Sri Susilo, MSi
UAJY Yogyakarta (Ilmu Ekonomi)
8. Dian Indri, SE, MSi
UPN "Veteran" Yogyakarta (Akuntansi)

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix
Sambutan Dekan UPN "Veteran" Yogyakarta	vii

TOPIK 1. EKONOMI PEMBAGUNAN

Model Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dengan <i>One Village One Product</i> untuk Mengurangi Kemiskinan di Indonesia Rudy Badrudin	3
Efektivitas Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) Akhmad Syari'udin, Hendri Gusaptono, dan Listya Endang Artiani	27
Ekonomi Biaya Tinggi dan Problem Struktural UKM di Era Otonomi Daerah I Ketut Nama	41
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) : Permasalahan, Peran dalam Perekonomian, Serta Pengembangannya Melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Wahyu Dwi Artaningtyas	47
Insentif Fiskal Di Bidang Kepabeanaan Untuk Meningkatkan Daya Saing Umkm I Made Rai Natawidnyana	57
Analisis Investasi pada Industri Kreatif, Pendidikan dan Pariwisata dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Akhmad Syari'udin dan Rini Dwi Astuti	67
Hubungan Supervisi Pimpinan Terhadap Kepuasan dan Kinerja Karyawan UMKM di Sleman Supeni Endahjati dan Teguh Erawati	83
Solusi Penanggulangan untuk Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia Sujatmika	91
Membangun Jejaring UMKM Melalui Kemitraan Kasus di Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulonprogo Teguh Kismantoroadji	97

ANALISIS INVESTASI PADA INDUSTRI KREATIF, PENDIDIKAN, DAN PARIWISATA DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Akhmad Syari'udin

Rini Dwi Astuti

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk membuat rancangan kebijakan yang tepat dalam rangka menarik investasi di DIY terutama pada industri kreatif, yang didukung oleh pendidikan dan pariwisata. Berdasarkan Teori Pertumbuhan Endogin, aspek penentu pertumbuhan ekonomi adalah adanya keputusan-keputusan yang menentukan penciptaan ilmu pengetahuan melalui penelitian dan pengembangan. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan mengurangi tingkat kemiskinan. Kajian ini menggunakan Analisis SWOT, yaitu instrumen perencanaan strategis untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis. Industri kreatif perlu dikembangkan di Daerah Istimewa Yogyakarta karena industri ini memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, menciptakan iklim bisnis yang positif, membangun citra dan identitas daerah, berdasarkan sumber daya manusia yang terbarukan, menciptakan inovasi dan kreativitas sebagai keunggulan kompetitif dan keunggulan daerah serta memberikan dampak sosial yang positif.

Kata Kunci: Investasi, Industri Kreatif, Pendidikan, Pariwisata, Kemiskinan, Analisis SWOT

1. PENDAHULUAN

Perkembangan investasi di DIY merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi di DIY. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan mampu memberikan efek menetes ke bawah (*trickle down effect*), yang mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan mengurangi tingkat kemiskinan. Investasi yang dilakukan secara tepat dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY.

Dalam upaya untuk menarik investor, dapat dilakukan dengan peningkatan sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja, serta mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam proses pembangunan dengan mengimplementasikan paradigma masyarakat membangun. Selain itu diperlukan peraturan daerah yang dapat mengembangkan "networking" atau jejaring kerja dan penciptaan iklim usaha yang kondusif, dengan memberikan kemudahan pelayanan publik. Hal ini diwujudkan dengan memberikan peluang pengurusan syarat investasi yang ketat namun tidak berbelit, melakukan pendekatan secara baik dengan calon investor, serta kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan dorongan kepada masyarakat untuk terbuka dalam hal potensi sosial budayanya.

Terkait dengan sumber daya manusia di daerah, pemerintah daerah dapat menetapkan peraturan untuk menjangkau penduduk lokal agar memiliki kemampuan dan keterampilan yang tepat, yang sesuai dengan potensi lokal. Misalnya saja dengan dibuka kursus/pelatihan yang sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki.

Dengan keterampilan sumber daya manusia yang memadai, dapat menjadi salah satu tujuan bagi investor luar daerah yang berkeinginan menanamkan modalnya di daerah tersebut.

Salah satu upaya menuju kemandirian daerah adalah memberdayakan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki dengan melakukan pengembangan ekonomi lokal (*local economic development*). Dalam perkembangannya, pengembangan ekonomi lokal memiliki beragam definisi, namun memiliki unsur yang sama antar definisi. Pada intinya pengembangan ekonomi lokal merupakan suatu proses penjalinan kepentingan atau kerjasama kolektif antara sektor pemerintah, swasta atau dunia usaha, dan masyarakat maupun organisasi lokal dengan mengoptimalkan sumber daya lokal untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah tertentu dengan tujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Porter (1990) menyatakan bahwa pengembangan ekonomi dapat dilakukan dengan melakukan penguatan spesialisasi pada unit-unit kecil wilayah otonom, dengan melakukan dua pendekatan yakni inovasi dan pembaharuan. Strategi pengembangan yang didasarkan pada tenaga kerja yang murah serta besaran skala ekonomi tertentu (*economies of scale*) merupakan paradigma yang sudah tidak relevan lagi. Penguatan kapasitas pada tingkat lokal dapat dicapai dengan mengoptimalkan keunggulan lokal dan masyarakat yang tinggal di wilayah lokal tersebut merupakan para pelaku kunci dalam mengkaitkan komponen-komponen kunci pembentuk daya saing wilayah.

Setiap daerah memiliki keunggulan masing-masing, namun seringkali keunggulan itu belum mampu meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian dalam melihat dan mengembangkan keunggulan tersebut, dengan merancang suatu konsep pembangunan yang memanfaatkan berbagai potensi tersebut, sehingga setiap daerah dapat saling mendukung, saling menunjang, dan saling menguntungkan. Metode cluster diyakini sebagai metode yang tepat dalam mengenal dan mengembangkan potensi ekonomi di daerah. Dalam membangun keunggulan daya saing suatu sektor usaha, metode cluster tidak hanya terpaku pada kemampuan internal dari sektor usaha tersebut, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti *suppliers, customers, service providers*, dan semua institusi pendukung (*human resources, R&D, finance, infrastructure, and regulatory environment*).

Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal.
2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan.
3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.
4. Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Teori Pertumbuhan Endogin, aspek penentu pertumbuhan ekonomi adalah adanya keputusan-keputusan yang menentukan penciptaan ilmu pengetahuan melalui penelitian dan pengembangan. Dalam model pertumbuhan ekonomi endogin tidak lagi berlaku hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang (*the Law of Diminishing Return*), tetapi berlaku hukum pertambahan hasil yang semakin meningkat (*the Law of Increasing Return*). Adanya penelitian dan pengembangan akan terus memunculkan inovasi dan kreativitas, sehingga kenaikan input akan menyebabkan kenaikan output yang terus bertambah.

Sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka investasi pada industri kreatif yang didukung oleh investasi pada pendidikan dan pariwisata diharapkan akan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mampu mengurangi tingkat kemiskinan di DIY. Masih banyaknya kendala yang dihadapi DIY dalam menarik investasi di daerah merupakan tugas bersama pemerintah maupun swasta untuk dapat meminimalkan kelemahan dan menggunakan kekuatan serta peluang yang ada. Kajian

ini bertujuan untuk membuat rancangan kebijakan yang tepat dalam rangka menarik investasi di DIY terutama pada industri kreatif, yang didukung oleh pendidikan dan pariwisata.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah kajian deskriptif, yakni metode kajian yang meneliti suatu keadaan dengan tujuan membuat deskripsi dan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta di lapangan pengkajian serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode analisis yang digunakan adalah "analisis strategis" melalui pendekatan sistematis dan terstruktur. Pendekatan sistematis dimana aspek kajian selalu didasarkan pada Aspek Internal dan Aspek Eksternal, baik yang merupakan potensi maupun permasalahan. Pendekatan terstruktur, yaitu: langkah-langkah perumusan strategi selalu diawali dengan mengidentifikasi dan mengkaji Aspek Internal dan Aspek Eksternal, yang kemudian dilanjutkan dengan mengkombinasikan kedua aspek tersebut. Selanjutnya digunakan metode *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menyederhanakan pemikiran dalam memilih satu atau beberapa pilihan atau alternatif. Pertimbangan kualitatif dibutuhkan untuk memilih komponen yang lebih penting dan seberapa besar pentingnya dibandingkan komponen-komponen lainnya.

Alat analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah Analisis SWOT, yaitu instrumen perencanaan strategis untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis (Rangkuti, 2005). Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*) namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan Ancaman (*Threats*).

Selain itu, instrumen ini memberikan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik untuk melaksanakan sebuah strategi. Selain itu, metode ini juga sangat menolong dalam proses penyusunan perencanaan terkait dengan apa yang bisa dicapai, dan hal - hal apa saja yang perlu diperhatikan.

Langkah pertama yang harus ditempuh adalah perumusan faktor internal dan faktor eksternal. Dalam tahapan ini dilakukan kajian terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang ada pada pengembangan sektor yang memiliki daya dorong investasi di DIY. Identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal ditetapkan mengacu pada permasalahan yang ada kemudian dilanjutkan dengan perumusan indikator-indikator permasalahan internal maupun eksternal. Data-data diperoleh dari hasil FGD dengan narasumber, mempelajari berbagai dokumen, peraturan perundang-undangan, observasi. Selanjutnya untuk melakukan analisis maka berbagai peluang, ancaman, kekuatan, kelemahan disusun ke dalam matriks seperti dapat dilihat pada Tabel 1. Selanjutnya dapat disusun strategi sebagai berikut:

1. Strategi SO yaitu strategi ini dibuat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar – besarnya.
2. Strategi ST yaitu strategi dengan menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman yang ada.
3. Strategi WO yaitu strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
4. Strategi WT yaitu strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Tabel 1. Matriks SWOT

	Internal Factor	Strengths (S)	Weaknesses (W)
External Factor			
Opportunities (O)		Strategi SO	Strategi WO
Threats (T)		Strategi ST	Strategi WT

Sumber: Rangkuti (2005)

3. PEMBAHASAN

A. Kondisi Perekonomian DIY

Berdasarkan data kontribusi PDRB menurut lapangan usaha, sektor perdagangan, hotel dan restoran memiliki kontribusi tertinggi terhadap PDRB yaitu sebesar 20,84 persen. Kedua sektor jasa sebesar 17,25 persen, ketiga sektor pertanian sebesar 16,07 persen dan keempat sektor industri pengolahan sebesar 13,48 persen. Dengan kata lain, sebesar 67,64 persen dari nilai PDRB DIY disumbang oleh empat sektor tersebut (Tabel 2).

Tabel 2. Nilai dan Kontribusi PDRB DIY Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 dan 2011

Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Miliar Rupiah)		Kontribusi (%)	
	2010	2011	2010	2011
1. Pertanian	3.633	3.556	17,26	16,07
2. Pertambangan dan Penggalian	140	157	0,67	0,71
3. Industri Pengolahan	2.794	2.983	13,27	13,48
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	193	201	0,92	0,91
5. Konstruksi	2.040	2.188	9,70	9,89
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	4.384	4.611	20,83	20,84
7. Pengangkutan dan Komunikasi	2.251	2.431	10,69	10,98
8. Keuangan, Sewa, dan Jasa Perusahaan	2.024	2.185	9,62	9,87
9. Jasa-jasa	3.586	3.818	17,04	17,25
Produk Domestik Regional Bruto	21.044	22.130	100	100

Sumber: BPS DIY

Tingginya kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran salah satunya disebabkan oleh perkembangan pariwisata di DIY. Di sisi lain, banyaknya mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi di DIY juga telah menggerakkan sektor perdagangan dan usaha kuliner di DIY. Perkembangan pariwisata dan pendidikan juga mampu mendorong perkembangan sektor jasa, sehingga sektor ini memiliki kontribusi PDRB terbesar kedua. Masih tingginya kontribusi sektor pertanian (terbesar ketiga), berarti sektor ini harus tetap menjadi prioritas bagi pengembangan ekonomi daerah meskipun pada tahun 2011 kontribusinya berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dilihat kontribusi sektor industri pengolahan (terbesar keempat) pada tahun 2011 yang meningkat dibandingkan periode sebelumnya, maka industri pengolahan ini dapat dikembangkan dan diarahkan pada industri kreatif yang mengolah bahan baku dari sektor pertanian, dalam arti industri tersebut memiliki *backward linkage* dengan sektor pertanian.

Tabel 3. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Februari 2010 – Agustus 2012

Lapangan Pekerjaan Utama	2010		2011		2012	
	Feb	Agt	Feb	Agt	Feb	Agt
Pertanian	32,21	30,40	24,31	23,97	24,24	26,91
Industri Pengolahan	15,06	13,92	14,17	14,83	15,65	15,13
Konstruksi	4,73	6,19	5,61	7,40	5,88	7,11
Perdagangan, Hotel dan Restoran	22,93	24,69	25,97	26,70	27,00	24,87
Pengangkutan dan Komunikasi	4,45	3,80	4,71	3,79	3,94	3,28
Keuangan, Real Estate dan Jasa						
Perusahaan	2,18	2,18	2,18	2,78	2,75	3,06
Jasa – jasa	17,43	17,93	21,76	19,60	20,33	18,76
Lainnya (Pertambangan, Penggalian, Listrik, Gas dan Air)	1,01	0,89	1,30	0,93	0,21	0,87
Total	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS DIY

Jika dilihat dari penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha, sektor pertanian menempati persentase tertinggi yaitu sebesar 26,91 persen pada Agustus 2012 (Tabel 3). Penyerapan tenaga kerja pada sektor ini cenderung mengalami peningkatan dibandingkan periode-periode sebelumnya terutama sejak Agustus 2011. Penyerapan tenaga kerja terbesar kedua adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 24,87 persen (Agustus 2012) dengan kecenderungan yang menurun dibanding periode sebelumnya. Sektor ketiga adalah sektor jasa, dimana penyerapan tenaga kerja mencapai 18,76 persen pada Agustus 2012. Keempat adalah sektor industri yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 15,13 persen (Agustus 2012).

Meskipun sumbangan sektor industri terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja masih menduduki posisi keempat. Industri kreatif yang berkembang di DIY sebagian besar adalah kerajinan yang mempunyai *backward linkage* dengan sektor pertanian (berbahan baku hasil pertanian, seperti bambu dan serat tumbuhan). Melihat kontribusi sektor pertanian yang menduduki posisi ketiga dalam memberikan sumbangan terhadap PDRB dan menempati posisi pertama dalam penyerapan tenaga kerja, maka pengembangan industri pengolahan (industri kreatif) harus diarahkan dalam rangka meningkatkan nilai tambah hasil sektor pertanian.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran menempati posisi pertama dalam sumbangan terhadap PDRB dan posisi kedua dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor dengan sumbangan terhadap PDRB terbesar kedua dan penyerapan tenaga kerja terbesar ketiga adalah sektor jasa. Perkembangan kedua sektor tersebut tidak dapat lepas dari perkembangan pendidikan dan pariwisata di DIY. Dengan demikian pendidikan dan pariwisata di DIY dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat industri kreatif untuk terus melakukan inovasi yang berbasis pada budaya lokal. Berdasarkan *best practice* di banyak negara, adanya cluster sektor industri telah berhasil menjadi motor penggerak ekonomi di suatu wilayah (Lee W. Munnich, 2004; Levelt, 2006; Shields, 2004). Keberhasilan sebuah cluster akan mendorong investasi yang lebih banyak lagi ke wilayah tersebut dan memberikan *multiplier effect* yang lebih tinggi bagi perekonomian. Untuk itu industri kreatif dapat dipilih sebagai *engine of growth* bagi DIY yang tidak dapat dilepaskan dari dukungan sektor pendidikan dan pariwisata di DIY.

Perekonomian yang semakin tumbuh dan berkembang harapannya mampu untuk menurunkan tingkat kemiskinan di DIY yang masih relatif tinggi. Secara nasional, tingkat kemiskinan di DIY pada bulan Maret 2012 adalah peringkat 24 dari 33 provinsi (BPS, 2012). Jika dilihat dari persentase penduduk miskin di DIY pada tahun 2011-2012 berkisar 16 persen (Tabel 4). Dengan persentase yang lebih tinggi pada daerah perdesaan sebesar 21,76 persen pada Maret 2012, dan sebesar 13,13 persen pada daerah perkotaan pada periode yang sama.

Tabel 4. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Tipe Daerah, Maret 2011 - Maret 2012

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)	Jumlah penduduk miskin (000)	Persentase penduduk miskin
Perkotaan			
Maret 2011	265 752	304,34	13,16
Sept 2011	273 678	298,92	12,88
Maret 2012	274 662	305,89	13,13
Perdesaan			
Maret 2011	217 923	256,55	21,82
Sept 2011	226 770	265,31	22,57
Maret 2012	231 855	259,44	21,76
Kota+Desa			
Maret 2011	249 629	560,88	16,08
Sept 2011	257 909	564,23	16,14
Maret 2012	260 173	565,32	16,05

Sumber: BPS DIY

B. Industri Kreatif

Menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), terdapat 14 sektor yang termasuk industri kreatif, meliputi: periklanan; arsitektur; pasar barang seni; kerajinan; desain; fashion; video, film dan fotografi; permainan interaktif; musik; seni pertunjukan; penerbitan dan percetakan; layanan komputer dan piranti lunak; televisi dan radio; serta riset dan pengembangan. Industri kreatif DIY berpusat pada pasar kerajinan tangan, kerajinan, desain, fashion, jasa komputer dan perangkat lunak. DIY memiliki sumberdaya manusia yang memadai dan sesuai untuk mengembangkan industri kreatif dalam skala besar. Industri kreatif perlu dikembangkan di DIY karena industri ini dapat memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, menciptakan iklim bisnis yang positif, membangun citra dan identitas bangsa, berdasarkan sumber daya manusia yang terbarukan, menciptakan inovasi dan kreativitas sebagai keunggulan kompetitif dan bangsa serta memberikan dampak sosial yang positif.

Beberapa jenis industri kreatif yang sudah dikembangkan di DIY tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Industri Kreatif di DIY

No	Wilayah	Industri Kreatif
1	Propinsi DIY	Periklanan, kerajinan, fashion, layanan komputer dan piranti lunak
2	Kota Yogyakarta	Pasar barang seni, kerajinan, fashion, film-video
3	Kab. Bantul	Pasar barang seni, kerajinan
4	Kab. Kulonprogo	Pasar barang seni, kerajinan
5	Kab. Gunungkidul	Kerajinan
6	Kab. Sleman	Periklanan, kerajinan, fashion, layanan komputer dan piranti lunak

Sumber : Disperindagkop DIY

Jumlah unit usaha industri kreatif yang dilakukan oleh pelaku usaha kecil dan menengah di DIY pada cabang industri sandang (fashion) dan kerajinan pada tahun 2010 adalah sebesar 26.026 unit dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 94.279 orang. Nilai investasi yang dibutuhkan pada industri tersebut adalah sebesar Rp 247.408.472,- dengan nilai produksi sebesar Rp 789.831.507,- dan nilai bahan baku/bahan penolong sebesar Rp 361.873.827,- (Tabel 6).

Tabel 6. Jumlah Industri Kecil Menengah, Tenaga Kerja, Investasi, Produksi, dan Bahan Baku Industri Kreatif (Fashion dan Kerajinan) di DIY Tahun 2010

No	Kabupaten/ Kota	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (orang)	Nilai Investasi (ribu rupiah)	Nilai Produksi (ribu rupiah)	Nilai Bahan Baku/ Bahan Penolong (ribu rupiah)
1	Yogyakarta	1.378	9.769	43.754.572	99.781.600	48.911.923
2	Sleman	5.342	21.946	86.561.229	390.809.178	198.052.068
3	Bantul	7.137	29.428	80.113.880	173.375.601	50.968.257
4	Kulonprogo	6.921	20.410	24.849.572	93.456.475	47.905.859
5	Gunungkidul	5.248	12.726	12.129.219	32.408.653	16.035.720
Jumlah		26.026	94.279	247.408.472	789.831.507	361.873.827

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM DIY

Jika dilihat dari pangsa eksportnya, 25 persen ekspor DIY berasal dari produk fashion (tekstil) pada tahun 2009. Pangsa tersebut meningkat menjadi 30 persen pada tahun 2010. Pangsa terbesar kedua berasal dari kerajinan.

Dari besarnya investasi, untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2009 dan 2010 mayoritas mengarah ke investasi hotel dan restoran dan kedua industri tekstil, dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak di industri tekstil dan kedua di investasi hotel dan restoran. Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2009 dan 2010 mengarah pada sektor tersier dengan nilai tertinggi pada jasa lain, hotel dan restoran, serta perdagangan, dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak pada industri tekstil dan perdagangan.

Pengembangan industri kreatif tetap memerlukan campur tangan pemerintah seperti dengan memberikan *support* kepada pelaku usaha baik akses permodalan maupun perizinan. Pasalnya, kreativitas sebagai faktor utama industri kreatif perlu dikelola untuk bisa terus berkembang. Industri kreatif sebaiknya sudah mulai dikenalkan sejak dini di bangku sekolah dengan memasukkannya ke dalam kurikulum. Pengembangan pusat-pusat industri kreatif seperti *creative city* ataupun *one village one product* yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah juga perlu segera dilakukan.

C. Pendidikan

Secara historis DIY dikenal sebagai pusat pendidikan dan daerah tujuan pendidikan di tingkat nasional. Keberhasilan Yogyakarta mempertahankan identitas sebagai kota pendidikan nampak dari banyaknya masyarakat luar daerah yang bersekolah di DIY, sehingga DIY menjadi representasi miniatur kehidupan nasional. Perkembangan akhir-akhir ini bahkan semakin nampak adanya aliran mahasiswa dari Luar Negeri untuk belajar dan melakukan penelitian di DIY dan memberikan harapan bagi terwujudnya DIY sebagai pusat pendidikan yang dikenal di tingkat global. Namun demikian pada saat ini, ditengarai adanya kecenderungan penurunan minat belajar ke DIY yang antara lain disebabkan oleh berkembangnya pendidikan di daerah lain sejalan dengan otonomi daerah.

Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa pada Tahun Ajaran 2010/2011, jumlah mahasiswa di DIY mengalami penurunan dibandingkan tahun ajaran sebelumnya. Di sisi lain, dengan semakin ketatnya peraturan Dikti terkait pendirian perguruan tinggi menyebabkan jumlah perguruan tinggi di DIY semakin berkurang. Jika dibandingkan dengan skala nasional, di mana terdapat 2.987 buah perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dengan jumlah mahasiswa 4.657.483 orang mahasiswa, maka jumlah perguruan tinggi dan jumlah mahasiswa di DIY masing-masing hanya sebesar 4 persen dan 5 persen dari total nasional.

Tabel 7. Jumlah Perguruan Tinggi dan Mahasiswa di DIY

Tahun Ajaran	PTS		PTN		Total (PTS + PTN)	
	Jumlah	Mahasiswa	Jumlah	Mahasiswa	Jumlah	Mahasiswa
2005/2006	116	131.518	6	83.350	122	214.868
2006/2007	119	127.844	na	na	119	127.844
2007/2008	123	137.105	6	84.344	129	221.449
2008/2009	117	137.600	10	86.024	127	223.624
2009/2010	120	172.086	10	74.704	130	246.790
2010/2011	112	154.222	10	78.992	122	233.214
Rata-rata	118	143.396	8	81.483	126	214.879

Sumber: BPS DIY

Berdasarkan survei biaya hidup mahasiswa di DIY yang dilakukan oleh UPN "Veteran" Yogyakarta bekerjasama dengan Kantor Bank Indonesia Yogyakarta pada tahun 2012 diketahui bahwa biaya hidup rata-rata mahasiswa di DIY adalah sekitar Rp 1,8 juta,- per bulan. Biaya tersebut termasuk biaya pondokan, makan, transportasi dan sebagainya. Dari total sekitar 233.214 orang mahasiswa di DIY, mereka mengeluarkan biaya hingga Rp 423 miliar per bulan, sehingga uang yang mengalir selama setahun mencapai Rp 5 triliun lebih. Uang mahasiswa tersebut menyumbang 9,82% PDRB DIY.

D. Pariwisata

Sektor pariwisata sebagai sektor andalan telah berperan dalam perekonomian daerah melalui sumbangannya terhadap PDRB dari sektor perdagangan, hotel, restoran dan sektor jasa-jasa. Aset pariwisata dapat dikelompokkan menjadi wisata alam, wisata budaya, wisata pendidikan dan wisata minat khusus. Secara umum kondisi aset tersebut baik dan mudah dijangkau karena dilengkapi infrastruktur yang memadai. Selain itu, prasarana hotel/penginapan dan restoran sebagai pendukung pengembangan pariwisata, juga tersedia memadai. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat (pemilik modal dan masyarakat lokal), secara terus menerus aset tersebut ditingkatkan dan dikembangkan, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Berdasarkan data tahun 2010-2012, wisatawan yang datang ke DIY tidak pernah menginap di hotel/penginapan lebih dari 2 hari. Saat *peak season*, tingkat hunian kamar bisa lebih dari 60 persen untuk hotel berbintang dan lebih dari 40 persen untuk hotel non bintang. Pada hari biasa (di luar *peak season*), tingkat hunian kamar juga hanya berkisar 50 persen untuk hotel berbintang dan 30 persen untuk hotel non bintang. Kecuali saat erupsi Merapi, tingkat hunian kamar kurang dari 25 persen untuk hotel berbintang dan kurang dari 30 persen untuk hotel non bintang.

Tabel 8. Tingkat Penghunian Kamar, Lama Menginap, dan Jumlah Wisatawan Menginap di DIY, April 2010 – April 2012

Tahun	Tk. Penghunian Kamar (%)		Rata-Rata Lama Menginap Wisatawan (malam)		Jumlah Wisatawan Menginap (orang)	
	Hotel Bintang	Hotel Non Bintang	Hotel Bintang	Hotel Non Bintang	Hotel Bintang	Hotel Non Bintang
Apr 2010	55,00	34,77	1,75	1,41	67.463	178.932
Nov 2010	24,59	25,03	1,67	1,63	33.345	100.598
Apr 2011	49,77	29,42	1,89	1,58	61.354	129.995
Des 2011	62,56	43,92	1,69	1,46	91.942	195.148
Apr 2012	51,36	35,07	1,92	1,57	78.893	152.253

Sumber: BPS DIY

Pada bulan April 2012, jumlah wisatawan yang menginap di hotel lebih dari 230 ribu orang. Jika diperkirakan pengeluaran rata-rata wisatawan sebesar Rp 2 juta per orang, maka besarnya transaksi yang dilakukan oleh wisatawan di DIY adalah sebesar Rp 460 miliar per bulan atau Rp 5,52 triliun per tahun (mencapai hampir 11 persen dari nilai PDRB DIY atas dasar harga berlaku tahun 2011).

4. ANALISIS SWOT

4.1. Kekuatan

DIY sebagai kota pendidikan dan tujuan pariwisata sangat mendukung bagi pengembangan industri kreatif di DIY. Potensi DIY bagi investasi dapat dilihat dari sisi penawaran (produksi) maupun sisi permintaan. Dari sisi penawaran, harus dibedakan antara potensi jangka pendek dan potensi jangka panjang. Potensi jangka pendek yang dapat diandalkan oleh DIY adalah pendidikan, pariwisata dan industri kreatif (termasuk di dalamnya industri berbahan baku komoditas-komoditas pertambangan dan pertanian), dan jumlah tenaga kerja yang relatif besar. Potensi jangka panjang adalah pengembangan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan terciptanya *social capital* (modal sosial) yang tinggi. Tidak ada satu daerahpun yang tidak mampu mengembangkan teknologi dan meningkatkan kualitas SDM-nya; namun ini sangat tergantung pada kemauan sungguh-sungguh dari daerah tersebut untuk melakukannya.

Jika potensi jangka panjang ini tidak dapat direalisasikan, dan berbagai permasalahan yang dihadapi tidak dapat diselesaikan dengan tuntas, maka lambat laun potensi jangka pendek akan hilang. Misalnya, salah satu permasalahan tenaga kerja adalah kualitas serta etos kerja yang relatif rendah. Selama ini, keunggulan klasik dari tenaga kerja Indonesia termasuk DIY relatif dibandingkan banyak negara lain adalah upah murah, namun saat ini dan terutama di masa depan, keunggulan ini (potensi jangka pendek) tidak bisa lagi diandalkan sepenuhnya. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, persaingan yang semakin ketat akibat munculnya banyak pemain-pemain baru di pasar dan produksi global yang sangat agresif dan semakin ketatnya penerapan segala macam standarisasi produk yang berkaitan dengan lingkungan dan keselamatan konsumen, maka mengandalkan upah buruh murah masih dapat dilakukan hanya apabila dikombinasikan dengan kualitas tenaga kerja yang tinggi. Karena upah murah akan tidak berarti apa-apa, jika produktivitasnya rendah dan produk yang dihasilkan berkualitas buruk.

Dari sisi permintaan, ada dua faktor utama yakni jumlah penduduk (dan strukturnya menurut umur) dan pendapatan riil per kapita. Kedua faktor ini secara bersama menentukan besarnya potensi pasar, yang berarti juga besarnya potensi keuntungan bagi seorang investor. Dari segi jumlah penduduk, pasar domestik merupakan potensi pasar yang relatif besar. Berdasarkan sensus penduduk Indonesia Tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237.641.326 jiwa, dengan median umur penduduk 27,2 tahun (termasuk kategori usia menengah), dan rasio ketergantungan penduduk 51,31 yang artinya untuk setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) terdapat sekitar 51 orang usia tidak produktif (0-14 dan 65+ tahun). Namun jumlah penduduk saja tidak cukup jika pendapatan penduduk rata-rata per orang atau kemampuan belanja konsumen kecil. PDRB per kapita DIY atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 mencapai Rp 14,85 juta (US\$ 1,707.31), lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar Rp 13,20 juta (US\$ 1,466.59). PDB per kapita Indonesia tahun 2011 diperkirakan mencapai Rp30,8 juta (US\$3.542,9) dengan laju peningkatan sebesar 13,8 persen dibanding PDB per kapita tahun 2010 sebesar Rp 27,1 juta (US\$3.010,1).

Berdasarkan hasil survei *Doing Business* Tahun 2012 yang membandingkan kebijakan usaha di 20 kota di Indonesia dan 183 perekonomian, termasuk Kota Yogyakarta. Hasil survei menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta menempati ranking 1 dalam hal kemudahan mendirikan usaha, ranking 5 dalam kemudahan mengurus izin mendirikan bangunan, dan ranking 6 dalam kemudahan pendaftaran properti (Bank Dunia, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta sudah sangat kondusif bagi investor yang ingin berinvestasi di DIY khususnya Kota Yogyakarta.

4.2. Kelemahan

Permasalahan yang muncul terkait dengan pengembangan sektor yang berdaya dorong investasi adalah masalah infrastruktur yang belum memadai dan keterbatasan lahan. Investasi dalam skala besar membutuhkan infrastruktur seperti jalan besar, tegangan listrik kapasitas tinggi, jaringan telekomunikasi yang kuat, serta ketersediaan lahan yang luas.

Di sisi produksi, industri kreatif khususnya industri kerajinan yang berbasis pada hasil pertanian juga menghadapi masalah keterbatasan bahan baku seperti serat tumbuhan yang masih tergantung pada pasokan dari luar daerah, sehingga keberlangsungan industri ini akan sangat tergantung pada kebijakan luar daerah. Untuk industri kerajinan kulit, kendala yang dihadapi adalah adanya ekspor kulit yang berkualitas baik, sehingga dapat menurunkan kualitas produk dari industri kerajinan. Di sisi lain, masih banyaknya industri yang hanya mengolah barang setengah jadi, sehingga nilai tambah industri menjadi rendah. Inovasi pelaku usaha dalam melakukan desain produk juga masih harus ditingkatkan. Desain seringkali hanya mengikuti permintaan pasar, belum melakukan spesifikasi produk yang unik yang menunjukkan ciri khas daerah. Usaha yang sifatnya turun temurun juga menyebabkan pelaku usaha hanya menjalankan rutinitas usaha tanpa berfikir tentang pengembangan sumberdaya manusia. Sehingga daya dorong bagi investasi menjadi rendah.

Maraknya praktek pembajakan juga dapat menghambat daya dorong bagi investasi pada industri kreatif. Insentif seseorang untuk berusaha dan berkreasi menjadi rendah karena tidak adanya perlindungan bagi karya ciptanya. Rumitnya pengurusan HaKI juga menjadi penyebab rendahnya perlindungan pada hak cipta.

Dukungan kelembagaan dari institusi-institusi terkait yang masih lemah juga dapat menyebabkan rendahnya daya dorong investasi. Salah satu institusi yang memiliki peran tinggi dalam pengembangan suatu sektor adalah perguruan tinggi. Pentingnya inovasi menuntut peran serta perguruan tinggi dalam penelitian dan pengembangan.

4.3. Peluang

Melihat potensi pasar domestik dan luar negeri yang sangat besar, maka peluang investasi pada sektor-sektor yang dapat mendukung industri kreatif di DIY terbuka luas. Peluang investasi tersebut dapat berupa:

1. Investasi pada industri hulu dan hilir
Beberapa industri kreatif di DIY khususnya kerajinan menghadapi masalah keterbatasan bahan baku. Sehingga memunculkan peluang untuk melakukan investasi penyediaan bahan baku bagi industri kreatif di DIY. Beberapa industri juga hanya memproduksi barang setengah jadi, sehingga memungkinkan untuk berinvestasi mengolah barang setengah jadi tersebut menjadi barang jadi, dengan mendekati diri pada produksi barang setengah jadi maka efisiensi produksi meningkat.
2. Investasi di sektor pendidikan
Perkembangan industri kreatif dapat mendorong peluang pendirian lembaga formal maupun non formal. Peluang juga dapat muncul pada lembaga pendidikan yang telah ada dengan membuka program studi baru yang dapat mendukung pengembangan sektor tersebut.
3. Investasi di sektor pariwisata
Peluang investasi terkait dengan pariwisata adalah pembangunan kawasan wisata yang belum ada di daerah atau bahkan negara lain. Pilihan lokasi wisata yang lebih variatif dapat meningkatkan lama tinggal wisatawan di DIY sehingga mampu memberikan daya dorong investasi yang lebih banyak lagi.

4.4. Ancaman

Ancaman yang dihadapi oleh sektor/sub sektor ekonomi di DIY dalam memberikan daya dorong bagi investasi adalah adanya perubahan-perubahan global yang semakin cepat dibandingkan dengan, bilang 20 tahun yang lalu, terutama dalam teknologi, sistem keuangan, pola perdagangan baik pada tingkat regional (*regionalism*) maupun pada tingkat dunia, dan selera masyarakat sebagai konsekuensi dari peningkatan

pendapatan per kapita. Perubahan-perubahan ini membuat pola produksi yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan terus berubah, dan ini selanjutnya mempengaruhi pemilihan lokasi usaha. Sebagai satu contoh konkrit, jika DIY tidak cepat memperbaiki kondisi infrastrukturnya, sementara daerah lain atau bahkan negara lain dengan laju yang cepat terus membangun jalan-jalan raya, jaringan-jaringan telekomunikasi, areal-areal untuk industri, dan pelabuhan-pelabuhan, maka DIY akan kehilangan peluang mendapatkan investasi-investasi baru dari luar.

Tingginya modal sosial masyarakat DIY juga dapat terancam oleh adanya aliran investasi asing yang bisa saja menyebabkan pergeseran budaya. Di samping itu, masalah inflasi, nilai tukar, krisis global, harga energi dan bencana alam juga dapat mengancam pengembangan sektor yang berdaya dorong investasi di DIY.

4.5. Matriks SWOT

Berikut adalah matriks SWOT yang berisi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh industri kreatif yang didukung oleh pendidikan dan pariwisata DIY yang berdaya dorong investasi.

Tabel 5.8. Swot Investasi

<p>Faktor Internal</p> <p>Faktor Eksternal</p>	<p>Kekuatan - S:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan nilai investasi 2. Peningkatan kemudahan mendirikan usaha 3. Tingginya modal sosial 4. DIY sebagai kota pendidikan dan budaya 5. Tidak memerlukan modal besar dalam usaha. 	<p>Kelemahan – W:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Infrastruktur belum memadai 2. Keterbatasan lahan 3. Kecenderungan investasi hanya mengarah ke sektor-sektor tertentu (terutama hotel dan restoran) 4. Backward dan Forward Linkage dari industri kreatif yang masih perlu 5. Keterbatasan informasi tentang peluang pasar. 6. Organisasi dan Manajemen yang sederhana/tradisional
--	---	---

<p>Peluang – O:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Investasi pada industri hulu (bahan baku) dan industri hilir (mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi) 2. Investasi pada sektor pendidikan yang mendukung industri kreatif 3. Investasi pada sektor pariwisata (membangun kawasan wisata yang belum ada di daerah lain) 4. Meningkatnya sektor perdagangan, dan pendidikan, serta sektor pariwisata yang potensial untuk dikembangkan. 	<p>Strategi SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kualitas sesuai dengan preferensi konsumen, terutama untuk wisatawan. 2. Mengoptimalkan usaha yang padat tenaga kerja, daripada pada modal. 3. Mengoptimalkan peran lembaga/institusi yang bergerak dalam pembinaan industri kreatif. 4. Memanfaatkan peluang kerjasama yang tersedia terutama untuk meningkatkan inovasi dalam produksi dan pemasaran. 5. Meningkatkan kemitraan strategis dengan lembaga keuangan sebagai sumber permodalan. 	<p>Strategi WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kinerja industri kreatif. 2. Melaksanakan dampingan manajemen produksi sesuai dengan ISO. 3. Melaksanakan dampingan untuk menerapkan SNI (Standar Nasional Indonesia) 4. Memfasilitasi sistem informasi pasar bagi pelaku industri kreatif. 5. Memfasilitasi sistem pemasaran dan pengelolaan pelanggan. 6. Dampingan dan pelatihan <i>up grading</i> kemampuan aspek manajerial produksi, pemasaran, dan keuangan 7. Memasukan mata pelajaran usaha kreatif dan inovatif sebagai mata pelajaran wajib bagi setiap siswa di semua jenjang pendidikan yang ada.
<p>Ancaman – T:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masuknya PMA dapat menyebabkan pergeseran budaya 2. Kebijakan progresif daerah/negara lain 3. Inflasi, nilai tukar, krisis global, harga energi dan bencana alam. 4. Kebijakan pemerintah belum fokus pada pengembangan industri kreatif dan melakukan sinergitas sektor pendidikan dan pariwisata sebagai dukungan pada industri kreatif. 5. Kurang optimalnya integrasi kelembagaan dan kebijakan pemerintah. 	<p>Strategi ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi dan menyediakan analisis secara komprehensif kondisi perekonomian baik di tingkat internasional, nasional dan lokal, terutama yang berhubungan dengan iklim dan keputusan usaha. 2. Meningkatkan pemanfaatan bahan baku lokal. 3. Mensinergikan pola pembinaan industri kreatif terpadu antar instansi pemerintah-NGO dengan pola partisipatif. 	<p>Strategi WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan partisipasi aktif dari pemerintah, perguruan tinggi dan NGO dalam rangka pengembangan industri kreatif, 2. Konsumen loyal dan ekspansi pemasaran melalui berbagai media pemasaran yang memungkinkan. 3. Membuat kerjasama strategis dengan pelaku industri kreatif yang memiliki skala lebih besar untuk mempertahankan persaingan usaha. 4. Peningkatan integrasi dan koordinasi kebijakan dan penerapan program di lingkungan pemda.

Sumber : Data Primer diolah

5. RANCANGAN KEBIJAKAN

Sumber Daya Manusia yang kreatif menjadi pokok dalam kegiatan perekonomian dan sebagai modal utama dalam pengembangan industri kreatif. Oleh karena itu keberadaan industri pendidikan, baik PTN (Perguruan Tinggi Negeri) maupun PTS (Perguruan Tinggi Swasta) menjadi modal dalam pengembangan industri kreatif tersebut. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) DIY, terdapat koridor pembangunan yaitu pendidikan yang berkualitas, pariwisata yang berbudaya, dan pelayanan jasa yang ramah lingkungan. Untuk itu maka pengembangan industri kreatif perlu bertumpu pada RPJP tersebut. Pengembangan industri kreatif dalam rangka mencari alternatif perekonomian yang tidak bergantung pada alam. Salah satu alternatif yang ditempuh adalah dengan mengalihkan pilihan pada ekonomi kreatif, yaitu perekonomian yang berbasis pada kreativitas dan kemampuan intelektual. Hal ini karena industri kreatif banyak memberikan kontribusi secara nyata pada perekonomian negara, khususnya DIY, yaitu peningkatan nilai ekspor, penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar, serta salah satu penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). DIY memiliki berbagai potensi, baik potensi sosial, ekonomi maupun budaya untuk dapat dikembangkan menjadi industri kreatif. Dengan demikian *linkage* antara kedua sektor potensial (pendidikan dan pariwisata) dengan industri kreatif perlu terus diupayakan melalui kebijakan-kebijakan, misalnya: Industri kreatif sebaiknya sudah mulai dikenalkan sejak dini di bangku sekolah dengan memasukkannya ke dalam kurikulum. Pusat-pusat industri kreatif seperti *creative city* dikembangkan dan dipadukan dengan pengembangan pariwisata (*city tour*) atau *grand design* pariwisata DIY. Dalam rangka pemberdayaan industri kreatif secara berkesinambungan dan berkelanjutan perlu dikembangkan model pembangunan berbasis cluster.

Sementara itu, swasta juga dapat berperan dalam mengembangkan cluster, di mana setiap cluster menspesialisasikan pengembangan keunggulan yang melekat pada komunitas lokalnya. Swasta dapat bekerja sama dengan universitas untuk mengembangkan riset dan mendirikan pusat-pusat latihan untuk meningkatkan ketrampilan tenaga kerja. Swasta juga dapat menginventarisir ketentuan-ketentuan yang menghambat dunia usaha dan mendiskusikannya dengan pemerintah guna mencari solusi. Hal lain, misalnya dengan bekerja sama dengan pemerintah untuk memasarkan produk-produk industri baik di pasar domestik maupun di pasar luar negeri. Keberhasilan suatu strategi kebijakan seperti halnya cluster ini memerlukan keterlibatan aktif dan komitmen dari pemerintah, pelaku bisnis (dari hulu ke hilir), akademisi, lembaga pendukung (seperti lembaga keuangan dan asosiasi), serta masyarakat yang memiliki peran dalam pengambilan keputusan yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan daya saing industri (industri kreatif) dan peningkatan pendapatan masyarakat serta penurunan tingkat kemiskinan.

Berdasarkan hasil analisis SWOT, maka dapat diusulkan rekomendasi strategi untuk mengembangkan cluster potensial di DIY yang mempunyai daya dorong investasi (industri kreatif) sebagai berikut:

1. **Meningkatkan kemampuan SDM** bagi pelaku industri kreatif pada aspek manajerial, antara lain: manajemen produksi, manajemen keuangan, manajemen SDM, dan sistem pencatatan hasil produksi.
2. **Menerapkan pola pendampingan yang berkelanjutan** dalam pengembangan kegiatan industri kreatif untuk memperbaiki kinerja industri kreatif dalam aspek manajemen, produksi, pemasaran, dan keuangan, serta penerapan model pengembangan sentra industri kreatif berbasis potensi lokal dan mempunyai daya dorong investasi.
3. **Meningkatkan integrasi dan koordinasi kebijakan** antara cluster potensial yang ada di DIY, yaitu cluster industri kreatif, cluster pendidikan dan cluster pariwisata.
4. **Meningkatkan integrasi dan koordinasi kebijakan** dan penerapan program lintas instansi di lingkungan pemda yang menangani pengembangan industri kreatif, serta bekerjasama dengan lembaga non pemerintah, baik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Asosiasi Profesi, maupun Perguruan Tinggi (PT).
5. **Memfasilitasi ketersediaan informasi pasar dan sistem pemasaran**, kemitraan dan jejaring antar pelaku usaha, serta implementasi teknologi tepat guna bagi industri kreatif untuk mempertahankan pasar domestik dan melakukan ekspansi ke pasar internasional.

6. Memberikan insentif lebih pada SDM dan lembaga yang mampu menghasilkan produk-produk baru, yang mampu menciptakan daya saing produk industri kreatif pada pasar lokal, regional, dan internasional.
7. Melakukan pendampingan yang berkelanjutan dalam rangka pengurusan izin usaha dan hak paten dari setiap penciptaan inovasi dan kreasi pelaku industri kreatif.
8. Mengoptimalkan kemitraan industri kreatif dengan berbagai lembaga keuangan bank dan non bank sebagai sumber peningkatan kapasitas pemodal usaha, termasuk fasilitasi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* bagi BUMN maupun BUMS.
9. Menciptakan tatakelola ekonomi daerah yang berkeadilan sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif bagi industri kreatif .

6. PENUTUP

DIY merupakan daerah yang memiliki SDM yang memadai untuk mengembangkan industri kreatif dalam skala besar. Oleh karena itu industri kreatif perlu dikembangkan di Provinsi DIY karena industri ini memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, menciptakan iklim bisnis yang positif, membangun citra dan identitas daerah, berdasarkan sumber daya manusia yang terbarukan, menciptakan inovasi dan kreativitas sebagai keunggulan kompetitif dan keunggulan daerah serta memberikan dampak sosial yang positif. Permasalahan yang masih menghambat adalah masih belum terintegrasinya antar cluster potensial (cluster industri kreatif, cluster pendidikan dan cluster pariwisata). Hal ini menyebabkan cluster potensial kurang memberi daya dorong investasi dan memberi dampak yang komprehensif dan signifikan pada kesejahteraan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2012, *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia Agustus 2012*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2012, *Berita Resmi Statistik BPS Provinsi D.I Yogyakarta*, beberapa edisi.
- Bank Dunia dan International Finance Corporation, 2012, *Doing Business di Indonesia 2012*, Washington DC.
- Barkley, David L. and Mark S. Henry, 2001, "Advantages and Disadvantages of Targeting Industry Clusters", *Redri Research Report*, No 09-2001-01, diunduh pada 10 Mei 2011.
- Barkley, David L. and Mark S. Henry, 2003, "Are Industry Clusters a Good Bet for Rural Development?", *Community Economics Newsletter*, No. 325, November, diunduh pada 10 Mei 2011.
- Dinc, Mustafa, 2002, "Regional and Local Economic Analysis Tools", *The World Bank*, Washington DC.
- Heijman, W.J.M., C.M. van der Heide, 2000, *Regional Economic Growth and Accessibility: The Case of the Netherlands*, Wageningen University, Netherlands.
- KPPOD, 2007, *Laporan Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah*, Kerjasama KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) dan The Asia Foundation.
- Lee W. Munnich, Jr., 2004, *Knowledge Clusters as a Means of Promoting Regional Economic Development*, diunduh pada 10 Mei 2011.
- Levelt, Melika, 2006, *Trade Clusters and Value Chains In The Netherlands: The Case of Fashion and Clothing*, diunduh pada 10 Mei 2011.
- Porter, Michael E., 2000, *The Microeconomic Foundations of Competitiveness and the Role of Klusters*. Mississippi. May, 2000.

Porter, M.E, 1990, *The Competitive Advantage of Nations*, The Free Press, New York.

Rangkuti, F., (2005), *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Shields, Martin; David Barkley and Mary Emery, 2004, *Industry Clusters and Industry Targeting*, diunduh pada 10 Mei 2011.

Penala:

http://www.dprd-diy.go.id/index.cfm?x=berita&id_berita=04112008151341, diunduh pada tanggal 8 Juli 2010.

<http://www.scribd.com/doc/28371540/06-BAB-IV-Visi-Misi-Tujuan-Dan-Sasaran>, diunduh pada tanggal 8 Juli 2010.